

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aristoteles. *Politik* (Diterjemahkan dari buku *Polities*, New York: Oxford University, 1995).(Yogyakarta: Bentang Budaya 2004).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007).
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Cahyadi, Antonius dan E Fernando Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
- Hadjon, Philipus M. *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993).
- . *Pengantar Hukum Administrasi*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002).
- . *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- _____. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- _____. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016).
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013).

- Kartasapoetra, Rien G. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011).
- . *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korups*. (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan, 2015).
- Oostenbrink, J.J. *Administratief Sancties*, (Den Haag: Vuga Boekerij, 1967).
- Ramli, Samsul dan Fahrurazzi. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014).
- Salam, Moch. Faisal. *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*. (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Setiawan, Yudhi. *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Simorangkir, J.C.T. *Hukum dan Konstitusi Indonesia*. (Jakarta: Gunung Agung, 1983).
- Tjakra Negara, R. Soegijatno. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Tundjung Herning Sitabuana. *Berhukum Di Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2017).
- . *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).
- Yuslim. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 77).

-----. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 35).

-----. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 160).

-----. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3874)

-----. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur - Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5494).

-----. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 292).

-----. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6037).

-----. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 3 Tahun 2020 Tertanggal 8 April 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

C. Artikel/Jurnal

Nugraha, Indra Ganjar. “Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Terkait Dengan Penggelapan Barang Persediaan Milik Negara Berdasarkan Hukum Penyelenggaraan Negara”. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* Vol. 8 No. 2 September 2018.

Syafrudin, Ateng. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Tahun 2000.

D. Internet

HukumOnline.com, “Aturan Sanksi Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Mengandung Nilai Keadilan”, [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c654b6da148/f/ahli--aturan-sanksi-pemberhentian-Aparatur Sipil Negara-mengandung-nilai-keadilan](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c654b6da148/f/ahli--aturan-sanksi-pemberhentian-Aparatur-Sipil-Negara-mengandung-nilai-keadilan), diakses tanggal 25 Februari 2021.

E. Putusan Pengadilan

Putusan PTUN Ambon Nomor: 41/G/2019/PTUN.ABN.